

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa lalu pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih banyak dilaksanakan melalui program-program yang sentralistik serta diterapkan secara seragam khususnya di daerah pedesaan, dengan sering mengesampingkan nilai-nilai budaya dan pranata sosial yang berkembang di masyarakat, dengan kata lain upaya pembangunan diwamai dengan pendekatan top down (dan atas ke bawah), dan sejumlah kasus yang terjadi dengan pola pelaksanaan seperti itu, menunjukkan bahwa penekanan alokasi dana dan program yang sentralistik telah menunjukkan mentalitas ketergantungan, memperlemah prakarsa, serta mengurangi kreatifitas dan daya inovasi masyarakatnya.

Pada saat ini, pembangunan daerah sebagai bagian yang integral dan pembangunan nasional tidak lepas dan prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, dengan memberikan pelayanan yang prima dan memberdayakan masyarakat adalah suatu aspek yang sangat fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya, dan ikut berperan aktif dalam setiap proses pembangunan daerah, hal ini juga terkait

dengan paradigma baru pemerintahan, yang tidak lagi dominant, namun bersifat sebagai fasilitator, dalam proses pembangunan, pemerintah daerah diberi kewenangan luas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan potensi sumberdaya, serta kemampuan dan

keunikan yang ada di daerah. Dengan kata lain, pembangunan daerah di masa kini dan masa yang akan datang hendaknya bercirikan karakteristik sosial budaya, dan ekonomi lokal (spesifik lokasi). Dalam kaitannya dengan pembangunan yang memperhatikan karakteristik potensi sosial budaya dan ekonomi lokal, di dalam kehidupan masyarakat terdapat nilai-nilai dan pranata sosial yang khas, yang dapat diberdayakan dalam proses pembangunan khususnya di pedesaan, pemanfaatan norma-norma kebersamaan, persaudaraan, dan kegotong-royongan, dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mewujudkan warga masyarakat yang mandiri yaitu:

1. Mempunyai semangat pembangunan yang tinggi.
2. Mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahannya sendiri.
3. Mempunyai kemampuan menyusun rencana untuk memecahkan berbagai permasalahannya.
4. Melaksanakan rencana yang telah disusun secara efisien dan efektif dengan bertumpu pada sumberdaya yang ada, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan yang dilakukan (Irwan Effendi, 2012:1-3).

Begitu pula dalam hal pembangunan desa yang merupakan bagian integral dan suatu daerah, pelaksanaan pembangunan desa yang merupakan usaha sadar suatu masyarakat, bangsa dan pemerintah, dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya, yang dilaksanakan oleh pemerintah yang melibatkan masyarakat, oleh karena itu

penyelenggaraan pembangunan desa tidak terlepas dan kesadaran setiap penduduk yang tinggal di Desa tersebut, partisipasi dan masyarakat merupakan suatu syarat yang dapat menjamin keberhasilan pembangunan, yang pada hakikatnya pembangunan desa adalah suatu proses modernisasi yang mengantarkan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ke arah penghidupan

yang lebih baik di masa depan. Tiga unsur yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pembangun desa yaitu:

1. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
2. Timbulnya gagasan-gagasan baru di masyarakat mengenai kehidupan mereka di masa depan;
3. Diterapkan teknologi yang tepat guna dan padat karya.

Pembangunan desa dimaksudkan untuk membantu dan mengacu masyarakat desa membangun berbagai sarana dan prasarana desa yang diperlukan, Langkah atau kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan perlu diletakkan dalam suatu kesatuan dengan daerah kota dalam rangka pengembangan wilayah yang terpadu. Artinya bahwa pembangunan desa adalah kegiatan yang berlangsung di Pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong, pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam dan mengembangkan sumberdaya manusia dengan mendapatkan bimbingan dan aparatur pemerintah yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing, ditingkat desa sebagai wadah untuk membina peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah desa menggerakkan pembangunan desa.

Pemerataan pembangunan hanya akan berkelanjutan apabila bersumber dan partisipasi masyarakat yang semakin meluas dan semakin merata dalam kehidupan ekonomi, partisipasi masyarakat yang semakin meluas dan merata hanya dapat muncul dalam iklim yang memberi peluang luas untuk bangkitnya prakarsa, kreatifitas, dan karya yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat lebih lanjut lagi dikemukakan bahwa partisipasi itu adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan secara suka rela dan atas kemauan sendiri.

Antara partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan (monil dan materil) masyarakat desa yang bersangkutan memang terdapat kaitan yang sangat erat sekali, kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut, hal ini karena partisipasi itu tidak lain adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan memang diperlukan karena keberhasilan suatu pembangunan khususnya pembangunan di desa ditentukan antara lain oleh kemampuan masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan. Dalam mewujudkan pembangunan di Desa khususnya pembangunan desa secara swadaya, partisipasi masyarakat desa yang dilakukan atas kemauan sendiri lebih dibutuhkan dan pada partisipasi masyarakat desa yang dipaksakan, karena hal ini merupakan awal dan kemauan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dan berkompetensi dalam pembangunan, yang akan memberikan perubahan positif bagi masyarakat tersebut, perubahan dalam setiap pembangunan sangat diperlukan karena pembangunan itu sendiri tidak lain adalah suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus, secara sadar dan berencana untuk menuju keadaan yang lebih baik dan pemerataan pembangunan hanya dapat berkelanjutan apabila bersumber dan partisipasi yang semakin merata dalam kehidupan.

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, setiap orang atau kelompok dalam masyarakat perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif kenyataan yang sering terjadi bahwa pembangunan di Pedesaan yang kurang berasal

dan masyarakat setempat, sehingga ada rangkaian kegiatan pembangunan tidak dilakukan oleh masyarakat setempat dan hal ini akan berakibat pada kegiatan pembangunan itu kurang bernilai konstruktif bagi masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, upaya penumbuhan gairah serta kemandirian masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sangat perlu untuk ditingkatkan mengingat masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Desa secara swadaya, upaya-upaya penumbuhan gairah serta kemandirian masyarakat tersebut antara lain dengan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam musyawarah desa dengan memberikan ide-ide, saran-saran, maupun dalam bentuk kegiatan nyata seperti bantuan tenaga, materi maupun bantuan lainnya demi kemajuan pembangunan desa secara mandiri. Dan keswadayaan tersebut akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Menjadikan masyarakat berkemampuan untuk mengembangkan perencanaan;
2. Mendorong masyarakat berkemampuan mengidentifikasi masalah yang ada disekitarnya secara bersama-sama dan;
3. Mendorong masyarakat berkemampuan mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan bersama. (Alhusniduki Hamim, 1996:165).

Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan harus mendasarkan kepada pendekatan bahwa pembangunan dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dengan bantuan pemerintah dan masyarakat secara seimbang, dalam hubungan ini pembangunan desa mengutamakan kepada prinsip imbalan kewajiban serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberikan bimbingan, pengawasan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan

partisipasinya dalam pembangunan yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan.

Pembangunan tidaklah berlangsung dengan iriudah jika tidak didukung oleh masyarakat, berbagai faktor sosial seperti tingkat pendidikan, Ekonomi, budaya masyarakat, dan rasa kesadaran juga memberi pengaruh pada perkembangan pembangunan, Cepatnya laju pembangunan desa adalah pencerminan dan kegiatan, Kesadaran untuk terus berkembang serta inisiatif dan masyarakat desa tersebut, pembangunan sebagai suatu perubahan bukan hanya mencakup perubahan dalam bidang ekonomi saja namun berkaitan pula dengan perubahan sikap dan tindakan dan masyarakat desa secara nyata, karena itu upaya penumbuhan gairah serta kemandirian masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa secara swadaya, agar kegiatan ini dapat terlaksana dibutuhkan partisipasi dan masyarakat baik berupa, tenaga, waktu dan dana maupun sumbangan pemikiran.

Agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik memang dibutuhkan waktu, tenaga dan dana yang tidak sedikit dan masyarakat, selain itu juga diperlukan persamaan pandangan dan persepsi dan masyarakat mengenai pembangunan, hal ini diperlukan mengingat kemampuan dan pengelahuan masyarakat desa yang berbeda-beda. Dan hal ini juga sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi yang diberikan. Selain kesadaran dan masyarakat itu sendiri untuk berpartisipasi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti diperoleh informasi bahwa potensi yang terdapat di Desa Kesugihan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik yang dimiliki desa Kesugihan meliputi:

1. Tanah, dalam arti sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan
2. Manusia, dalam artian tenaga kerja sebagai pengelola tanah sebagai produsen.

Selain potensi fisik adapula potensi non-fisik yang dimiliki desa Bawang Sakti

Jaya yang meliputi:

1. Masyarakat desa Kesugihan yang penghidupan dan kehidupannya berdasarkan gotong royong yang merupakan suatu kesatuan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian.
2. Lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan yang ada di desa Kesugihan merupakan potensi positif bagi pembangunan desanya.
3. Perangkat pamong desa merupakan potensi yang cukup menjamin kelancaran pemerintah desa.

Ke semua potensi ini telah diolah dan dikembangkan dengan baik oleh masyarakat Desa Kesugihan, adanya persamaan senasip sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi, selain pada kesadaran penduduk dan tradisi yang sudah melekat sebagai bagian dan hidup bergotong-royong, akan tetapi keragaman pekerjaan juga sangat berpengaruh pada partisipasi seperti misalnya tingkat partisipasi pada pegawai negeri sipil berbeda dengan partisipasi tukang becak dan petani, kesediaan waktu, pikiran, dana, dan tenaga tentunya sangat berbeda-beda di antara ketiganya, keadaan ekonomi dan pemukiman penduduk yang terpencar menjadi sulitnya komunikasi partisipasi dan tingginya penghormatan kepada aparat desa pun terkadang menjadikan mereka malu untuk tidak berpartisipasi.

Jika dilihat dan kondisi partisipasi dalam kegiatan pembangunan, terutama pembangunan desa secara swadaya, di Desa Kesugihan nampak adanya keragaman, hal ini dapat dilihat dari partisipasi mereka dalam proses kegiatan pembangunan.

Pembangunan fisik yaitu pembangunan berupa sarana dan prasarana yang dapat berupa pembangunan musholla, pembangunan pos siskamling dan lain sebagainya, sedangkan pembangunan non-fisik yaitu pembangunan mental spiritual yang dapat berupa penyuluhan KB, penyuluhan pertanian serta penyuluhan kesehatan, tetapi pada penelitian ini fokus dan penelitian adalah berupa pembangunan secara fisik dengan titik tekan pada swadaya murni, yaitu disini pembangunan atau pengerasan jalan desa.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dengan sistem swadaya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dengan sistem swadaya di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Lampung Selatan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dengan sistem swadaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan pengetahuan sosiologi khususnya yang berkenaan dengan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan pada masyarakat Desa, dan khususnya kajian ilmu sosiologi pembangunan dan sosiologi pedesaan.

2. Secara praktis

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkaitan dalam bidang pembangunan.